

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Dimana, hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Menurut Mulyanto dalam Kuswara dan Kusmana,¹ “Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi”. Di abad ke – 21 ini, penerapan sistem informasi tidak hanya diimplementasikan pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi saja, namun kebutuhan proses bisnis lain juga sangat membutuhkan kontrol dari Sistem Informasi. Sehingga, sistem informasi terbentuk sebagai tipe khusus dari proses kerja.

Penggunaan dari Sistem Informasi sendiri ditujukan untuk mengolah berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu

¹ Kuswara dan Kusmana, sistem informasi secara umum (Bekasi, Indonesia Journal on Networking and Security 2017)

penanganan proses. Selain itu, data yang dikelola juga dapat digunakan kapan saja dan dimana saja, serta mampu mempersingkat birokrasi yang ada.

Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna (*user*). Untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka anda perlu memperhatikan ketiga faktor ini. Pertama, data tersebut harus relevan atau tepat sasaran (*relevance*). Kedua, tepat waktu dan efisien (*timeliness*). Dan yang ketiga adalah tepat sasaran atau akurat (*accurate*).

Ketika semua faktor tersebut telah terpenuhi dengan baik, maka tujuan dari implementasi SI bagi bisnis dan usaha anda akan menghasilkan output yang maksimal dan optimal. sebagai upaya peningkatan administrasi kependudukan di Kota Depok oleh karena itu Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.

Bidang pengelolaan Informasi Administrasi dan Pengendalian Kependudukan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang pengelolaan informasi administrasi dan pengendalian kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengendalian dan pengawasan,

serta penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar dengan persebaran tidak merata serta rendahnya kualitas penduduk menjadi permasalahan berkaitan dengan kependudukan di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Menyikapi permasalahan kependudukan, para penyelenggara negara dituntut untuk bekerja lebih keras mulai dari pemerintahan tingkat pusat hingga ke tingkat pemerintahan yang terkait dengan mengumpulkan dan menjamin ketersediaan data kependudukan secara akurat dan lengkap sesuai yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi informasi kependudukan.

Menyikapi berbagai permasalahan pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, adapun perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non alami, pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk membuat pemetaan guna menanggulangi masalah kependudukan. Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Depok dalam pelaksanaannya diawali dari kelurahan namun sekarang sudah ditangani oleh disdukcapil selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, sehingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan,

sehingga pelayanan perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar kependudukan sebagai pelanggan merasa mendapat pelayanan yang memuaskan.²

Ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk yang lengkap dalam pembangunan di negara kita merupakan aspek yang memegang peran sangat penting. Hal ini menuntut kerja keras para penyelenggara negara mulai dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah di dalam mengumpulkan dan menjamin ketersediaan data penduduk yang dibutuhkan dalam rangka dukungan informasi mengenai kependudukan yang baik untuk pihak yang berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan di Indonesia. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengeloaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Data tersebut merupakan sumber basis data yang terintegritas secara nasional sehingga keakuratan data dapat dipertanggung jawabkan karena seluruh data telah tersimpan dalam server pusat.

² Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Publik.”

Tabel 1.1

Data Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki dan Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
					9				
Sawangan	84.239	-	-	81.392	-	-	165.631	171.068	178.928
Bojongsari	67.822	-	-	65.860	-	-	133.070	138.070	135.661
Pancoran	141.830	-	-	140.337	-	-	282.167	291.429	244.975
Mas									
Cipayung	87.037	-	-	84.420	-	-	171.457	177.085	171.587
Sukmajaya	154.338	-	-	157.041	-	-	311.379	321.600	252.531
Cilodong	84.562	-	-	83.003	-	-	167.565	173.066	168.178
Cimanggis	163.834	-	-	160.509	-	-	324.343	334.989	252.014
Tapos	145.498	-	-	144.311	-	-	289.809	299.322	263.366
Beji	112.487	-	-	109.885	-	-	222.372	229.322	171.723
Limo	59.616	-	-	58.274	-	-	117.890	121.760	115.718
Cinere	71.839	-	-	72.199	-	-	144.038	148.766	101.654
Kota	1.173.10	-	-	1.157.23	-	-	2.330.33	2.406.826	2.056.335
Depok	2			1			3		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. SIAK melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk sejak lahir hingga meninggal dunia. Data kependudukan yang tersimpan dalam basis data yang keluarannya antara lain: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, dan sebagainya. Pendataan kependudukan dan catatan sipil yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada mulanya dikenal dengan istilah SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) pada tahun 1996. Namun pada pelaksanaannya dilapangan, sistem ini memiliki banyak kelemahan sebagai sebuah sistem yang mengelola data kependudukan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap SIMDUK, maka Pemerintah Indonesia membuat SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sebagai sistem yang mengolah data kependudukan dan catatan sipil di Indonesia. Kelebihan dari SIAK selain untuk mendata penduduk secara akurat tetapi juga dapat memberikan NIK yang secara otomatis dan tetap untuk satu penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda.

SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dengan Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

SIAK dalam Permendagri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan memiliki definisi bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.³

Keberadaan sistem informasi administrasi kependudukan akan menghasilkan data kependudukan yang akurat baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga dengan data yang akurat tersebut berguna untuk implementasi kebijakan atau program Pemerintah lainnya seperti pendataan statistik, menentukan Daftar Pemilih Tetap untuk pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, sebagai acuan pemberian "Bantuan Langsung Tunai" dan "Bantuan Langsung Sementara Masyarakat", dan pedoman untuk pengambilan kebijakan publik lainnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan."

Daerah. Mempunyai tugas sebagai pelaksanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Yang diatur dalam Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru, selain itu sistem pelayanan administrasi kependudukan perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring.⁴ Maka dari itu Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat inovasi dalam mempermudah urusan kependudukan dengan menerbitkan sebuah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus berkas kependudukan. Namun dalam pengimplementasinya masih banyak ditemukan masalah yang terjadi dalam sistem informasi tersebut.

Permasalahan yang terjadi, dalam kegiatan kegiatan pemerintah dalam dinas kependudukan pencatatan sipil Hambatan dalam implementasi SIAK diantaranya jaringan internet yang lambat dan juga pengiriman berkas ke Dispenduk yang masih manual. bahwa masyarakat masih kurang sosialisasi yang menyebabkan sosialisasi belum cukup baik, sistem informasi adminisrasi penduduk juga sering mengalami error sistem yang membuat keterlambatan dalam menginput

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.”

data. Transaksi paling tinggi perhari yang dilayani yaitu permohonan KTP rusak, hilang, dan perubahan data karena pindah, ganti kartu keluarga, ganti status.



Sumber: Sosial media disdukcapil

Berdasarkan latar diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang saya buat ini adalah untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kota Depok.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan atau sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi serta menjadi acuan studi ilmu administrasi publik khususnya yang terkait dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) yang dimaksud untuk memberikan pengertian akan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan pentingnya mengurus administrasi kependudukan sebagai warga Negara Indonesia yang sah secara hukum.

2. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan atau tambahan wawasan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelayanan publik administrasi kependudukan dan kebijakan kependudukan.

3. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikiran ilmu pengetahuan dalam penelitian Implementasi Sistem Administrasi Bidang Kependudukan guna mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang sejenisnya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Bagi lembaga pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai sistem informasi administrasi penduduk kedepannya.
2. Bagi fakultas penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai refrensi.
3. Peneliti lain, sebagaii informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang serupa.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi hasil penelitian (penelitian terdahulu yang relevan), kerangka teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

Bab ini berisi membagikan hasil riset yang terjadi dilapangan serta mendeskripsikan cerminan universal dari posisi riset yang diambil dan menganalisa hasil dari tiap jawaban dari para informan buat mendeskripsikan apakah ada pengaruh dari judul yang di informasikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi membagikan kesimpulan dari hasil riset, dan membagikan anjuran yang bermanfaat yang berkaitan dengan kasus yang terdapat.

